



## Kontribusi Mikrofinance terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada Sektor UMKM di Kota Binjai

Muhd. Aidil Fitri<sup>1</sup>, Adrian Niken Lubis<sup>2</sup>, Nurul Noviyana<sup>3</sup>, Fitri Hayati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[aidilfitry1474@gmail.com](mailto:aidilfitry1474@gmail.com)<sup>1</sup>, [adrianniken157@gmail.com](mailto:adrianniken157@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurulnoviyananurul@gmail.com](mailto:nurulnoviyananurul@gmail.com)<sup>3</sup>, [fitrihayati@uinsu.ac.id](mailto:fitrihayati@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

*Lembaga keuangan mikro atau (microfinance), berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Binjai. Penelitian ini terletak pada fakta bahwa pelaku UMKM masih memiliki akses terbatas pada pembiayaan formal dan bahwa banyak orang tidak tahu tentang keuangan, yang berdampak pada rendahnya kemandirian ekonomi lokal, microfinance Kota Binjai masih mengalami kendala seperti kapasitas kelembagaan yang terbatas, kurangnya digitalisasi layanan, dan kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Peran microfinance dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan adalah subjek penelitian ini, yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa microfinance memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan akses permodalan, dan memberikan pendampingan usaha kepada usaha mikro dan kecil serta. Selain itu, microfinance juga berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing. Peran tersebut secara langsung mendukung pencapaian SDG 1, SDG 8, SDG 10, dan SDG 17 melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan ekonomi, dan penguatan kemitraan. Studi ini menemukan bahwa untuk membangun ekosistem microfinance yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, tata kelola harus diperkuat, inovasi digital harus dipromosikan, dan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan ekonomi lokal terus berkembang, sehingga dibutuhkan lembaga keuangan mikro yang mampu bertransformasi mengikuti kebutuhan UMKM.*

**Kata Kunci :** Lembaga Keuangan Mikro, UMKM, SDGs, Inklusi Keuangan, Kota Binjai

### 1. Latar Belakang

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi menunjukkan hal ini. dan UMKM (2021) menunjukkan bahwa ada hampir 64,2 juta usaha mikro di Indonesia, dengan lebih dari 98% berada di posisi usaha mikro (Jee Sinha et al., 2024). Peran UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5%, nilai investasi sebesar 60%, dan kemampuan untuk menyerap tenaga kerja sebesar 96,9 persen. Meskipun peran UMKM sangat penting, ada beberapa hal yang masih menjadi catatan dan perlu diperhatikan. Menurut data yang sama dari Kementerian Koperasi dan UMKM (2021), rasio kewirausahaan nasional masih 3,47%, dengan kemampuan UMKM untuk kemampuan UMKM untuk menjalin kemitraan sekitar 7%, kemampuan mereka untuk melakukan digitalisasi 16%, dan partisipasi mereka dalam rantai nilai global masih sekitar 4,1% (Nugraha et al., 2025).

Indonesia menghadapi tantangan untuk memanfaatkan potensi demografinya sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% per tahun (Nainggolan & Budiman, 2024). Termasuk dalam memberikan kesempatan yang sama untuk permodalan bagi bisnis kecil yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank tradisional. Untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan pembiayaan, lembaga keuangan mikro atau LKM hadir (Kusjuniati, 2020). Dengan sumber pendanaan yang tersedia, lebih mudah dan lebih murah. Umum kecil dan menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan mengembangkan inovasi bisnis. Mengingat UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam menopang Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja, peningkatan produktivitas ini secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. LKM membantu memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan sektor usaha di berbagai wilayah melalui dukungan keuangan yang berkelanjutan (Tremblay et al., 2016).

Kontribusi Mikrofinance terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada Sektor UMKM di Kota Binjai

---

Sampai akhir 2022, 22 dari 38 provinsi Indonesia memiliki LKM. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satunya. merupakan provinsi dengan jumlah LKM terbanyak, sebanyak 118 LKM, atau 48,76% dari total LKM. Jawa Timur memiliki 42 LKM, dan Jawa Barat memiliki 28 LKM (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

**Tabel 1.** Jumlah Pelaku LKM Berdasarkan Data Provinsi

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	1	2	2	2	2
Banten	7	7	6	6	6
Bengkulu	3	3	3	3	3
D.I Yogyakarta	5	4	6	6	6
DKI Jakarta	-	-	1	1	1
Jambi	1	1	1	1	1
Jawa Barat	22	26	28	29	28
Jawa Tengah	86	108	122	119	118
Jawa Timur	16	20	22	24	42
Kalimantan Selatan	-	1	1	1	1
Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
Kalimantan Timur	1	1	1	1	1
Lampung	9	9	10	11	11
Maluku	-	1	1	1	1
Nusa Tenggara Barat	2	3	3	3	3
Papua	1	1	1	1	1
Riau	-	2	2	2	2
Sulawesi Barat	7	1	1	1	1
Sulawesi Selatan	1	1	1	1	1
Sumatera Barat	17	8	8	8	8
Sumatera Selatan	-	1	2	2	2
Sumatera Utara	3	3	3	2	2
<b>Total</b>	<b>183</b>	<b>204</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>242</b>

Jumlah pelaku LKM di Sumatera Utara cenderung stagnan pada angka 3 dari tahun 2018 hingga 2020. Namun, terjadi penurunan menjadi 2 pelaku LKM pada tahun 2021 dan 2022. Perbandingan dengan Provinsi Lain, seperti Jawa Tengah atau Jawa Barat, jumlah pelaku LKM di Sumatera Utara relatif lebih sedikit. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kondisi ekonomi, regulasi daerah, atau tingkat kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan mikro. Implikasi Penurunan jumlah pelaku LKM pada tahun 2021 dan 2022 bisa menjadi indikasi adanya tantangan atau perubahan dalam industri keuangan mikro di Sumatera Utara. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memahami penyebabnya dan dampaknya terhadap akses keuangan masyarakat.

Menurut definisi *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang memberikan layanan keuangan kepada usaha mikro, pembayaran untuk berbagai jenis jasa serta penyediaan dana kepada pengusaha kecil dan masyarakat miskin. Lembaga keuangan mikro dapat berbentuk formal, seperti bank desa dan koperasi; semiformal, seperti organisasi nonpemerintah; dan informal, seperti pelepas uang dan retenir. Nugroho (2011) menyatakan terdapat empat kategori organisasi yang berperan dalam sektor keuangan mikro di Indonesia: (1) program pinjaman mikro; (2) lembaga keuangan mikro resmi; dan (3) lembaga keuangan mikro semi-formal, serta (4) lembaga keuangan mikro tidak resmi. Lembaga keuangan mikro resmi beroperasi di bawah regulasi perbankan seperti unit perbankan mikro nasional, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Tim Peneliti, 2022).

Permasalahan UMKM terus menghadapi tantangan untuk mendapatkan pembiayaan, terutama akses perbankan. Bank Indonesia (2022) menyatakan bahwa masih banyak faktor yang menyebabkan UMKM tidak dapat mendapatkan pembiayaan yang mengalami kesulitan mendapatkan akses ke bank dan lembaga keuangan lainnya karena mereka tidak memiliki agunan yang cukup atau tidak cukup, serta kurangnya pengetahuan tentang cara mendapatkan informasi tentang perbankan (Saifurrahman & Kassim, 2022).

Sebagai salah satu pusat perekonomian regional kota Binjai bersama dengan Medan, merasakan dampak globalisasi ekonomi. Kedua kota harus memiliki daya saing ekonomi yang baik juga. Pemerintah kota Binjai memiliki otoritas penuh untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas perekonomian lainnya. Ini akan pada akhirnya meningkatkan pendapatan regional dan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah secara langsung (Sefti Arif Lubis Paidi Hidayat, 2020). Salah satu kota besar di Sumatera Utara, Kota Binjai hampir tidak bergerak dan cenderung stagnan. Untuk menjadi kota yang berdaya saing, Kota Binjai harus memanfaatkan sumber dayanya dengan lebih baik. Membangun ekonomi kota Binjai, khususnya membangun Lembaga Keuangan Mikronya (LKM), menghadapi banyak tantangan, terutama karena banyak regulasi dan kebijakan yang tidak mendukung secara menyeluruh. Ketidakjelasan regulasi dan kebijakan ini dapat menghambat operasional LKM dalam memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip perekonomian.

Namun, pemahaman tentang ekosistem LKM sangat penting untuk pengembangan LKM di masa depan. Meskipun masih sulit untuk menemukan penelitian yang mendalam tentang ekosistem LKM. berkelanjutan (*sustainability*), bekerja sama, dan terintegrasi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, (1) Bagaimana kontribusi LKM dalam menerapkan sistem keberlanjutan pada UMKM kota Binjai? (2) Strategi apa yang harus dilakukan pihak LKM dalam meningkatkan ekosistem tujuan pembangunan berkelanjutan pada UMKM? Kemudian penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi apa yang diberikan *microfinance* dalam mencapai tujuan keberlanjutan pembangunan pada UMKM, menganalisis strategi apa yang seharusnya dilakukan pihak LKM dalam meningkatkan literasi *microfinance* khususnya di daerah menengah seperti Kota Binjai. Maka dari itu penelitian ini merujuk pada judul “Kontribusi Mikrofinance terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada Sektor UMKM di Kota Binjai”

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *study literature review* untuk menganalisis kontribusi *microfinance* terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada sektor UMKM di Kota Binjai. Metode *literature review* dipilih karena memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman mendalam melalui kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012; Taylor, 2013).

Pengumpulan data dilakukan dengan mereview beberapa jurnal penelitian yang dipublikasikan pada periode terkini, terakreditasi Sinta, Garuda dan *Google Scholar* dan memiliki relevansi langsung dengan peran *microfinance* dalam pemberdayaan UMKM serta kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Pemilihan jurnal didasarkan pada kriteria kualitas publikasi, relevansi topik, dan cakupan penelitian yang sesuai dengan fokus studi ini (Ramdhani et al., 2014). Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif dan sintesis, dengan cara mengorganisasi temuan penelitian terdahulu untuk menggambarkan pola dan kontribusi *microfinance* dalam memperkuat UMKM sebagai bagian dari penggerak pencapaian SDGs (Fraenkel et al., 2012; Kitchenham, 2004).

*Study literature review* dalam penelitian ini berperan penting sebagai sumber data sekunder yang memuat hasil-hasil penelitian valid dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen akademik. Dengan melakukan analisis kritis dan pemetaan temuan dari kesepuluh jurnal tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran sistematis yang komprehensif terkait peran mikrofinance dalam mendukung UMKM di Kota Binjai serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Taylor, 2013; Fraenkel et al., 2012).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana *microfinance* membantu sektor UMKM mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), penelitian terdahulu yang relevan telah dievaluasi. Tabel berikut menyajikan ringkasan penelitian tersebut, yang mencakup fokus penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, dan relevansinya dengan topik penelitian. Tujuan dari penyajian sistematis ini adalah untuk membantu orang lebih memahami cara mikrofinance membantu UMKM dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Ade Kurniawan, Arip Rahman	Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Analytic Network Process (ANP) untuk Mengolah	Fokus utama adalah memperkuat kapasitas internal melalui peningkatan literasi

	(Kurniawan & Rahman, 2024)	terhadap Pencapaian SDGs: Studi Kasus BMT IMADA Kuningan	data kualitatif dan kuantitatif.	keuangan syariah dan pengelolaan modal. Digitalisasi menjadi kunci untuk efisiensi operasional, perluasan distribusi dana, dan penguatan komunikasi.
Link akses : <a href="https://jurnal.tazkia.ac.id/index.php/irtiqo/article/download/474/417">https://jurnal.tazkia.ac.id/index.php/irtiqo/article/download/474/417</a>				
2	Abdul Wahab, Ilma Mahdiya (Wahab & Mahdiya, 2025)	The Role of Islamic Micro Finance in Promoting Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia	metode deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis literatur dan studi kasus	<i>Islamic microfinance</i> berperan penting dalam pencapaian SDGs di Indonesia, terutama dalam pengentasan kemiskinan, inklusi keuangan, dan pemberdayaan usaha mikro. Meski masih menghadapi tantangan, strategi seperti penguatan modal, digitalisasi, dan edukasi dapat mengoptimalkan kontribusinya.
Link akses : <a href="https://international.areai.or.id/index.php/IJEMS/article/view/674">https://international.areai.or.id/index.php/IJEMS/article/view/674</a>				
3	Riyan Harbi Valdiansyah, Dian Widiyati (Valdiansyah & Widiyati, 2024)	Peranan <i>Sustainable Finance</i> pada industri UMKM Indonesia: Tantangan dan Peluang	Metode penelitian ini adalah tinjauan pustaka ( <i>literature review</i> )	Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam keuangan berkelanjutan adalah mengubah pola pikir pelaku usaha dan masyarakat: dari fokus pada keuntungan jangka pendek menjadi orientasi pada kesejahteraan jangka panjang dengan mempertimbangkan potensi alam dan dampak sosial.
Link akses : <a href="https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/713">https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/713</a>				
4	Niken Baramurti, Evieta Enggar Sandy (Sandy, 2022)	Peran Islamic Microfinance dalam Menciptakan Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM di Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi pustakaan.	Pembiayaan berkelanjutan oleh LKMS berperan besar dalam mendorong UMKM, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi kemiskinan. Karena itu, penguatan LKMS perlu menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.
Link akses : <a href="https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/8809">https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/8809</a>				
5	Pambudi Nugroho, Septiawan Pratama Faizal Ahmad, Noelio Yudhistira Nugroho (Nugroho et al., 2025)	Peran Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Inklusi Asuransi Umkm Dalam Pencapaian Sdgs 2030 Di Indonesia	Pendekatan metodologis yang digunakan adalah kuantitatif.	Kepercayaan dan persepsi risiko sangat berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam mengambil asuransi. Karena itu, peningkatan literasi keuangan perlu disertai program pembangunan kepercayaan melalui kampanye publik dan pelatihan tentang perlindungan keuangan.
Link akses : <a href="https://ejournal.stma-trisakti.ac.id/index.php/premium/article/view/204">https://ejournal.stma-trisakti.ac.id/index.php/premium/article/view/204</a>				
6	Trimulato, Nur Syamsu, Mega Octaviani (Banerjee, 2017)	Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif	Penelitian ini bersifat kualitatif	Bank syariah mampu menyalurkan pembiayaan produktif bagi UMKM, mendorong pertumbuhan

		UMKM di Bank Syariah		ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan. Dengan akses ke layanan keuangan, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs.
Link akses : <a href="https://jurnal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/269/180/">https://jurnal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/269/180/</a>				
7	Evita Martha Dewi (gita somantri, 2018)	Inbank: Strategi Integrasi Lembaga Keuangan Untuk Penyaluran Kredit Mikro Di Indonesia	Penelitian ini, menggunakan metode studi pustakaan	Sistem inBank mengintegrasikan lembaga keuangan untuk mengatasi masalah akses, registrasi, dan validasi. Kolaborasi bank umum, LKM, dan fintech—melalui linkage program, agen Laku Pandai, dan teknologi penilaian kredit—memperluas jangkauan dan mempercepat proses pembiayaan.
Link akses : <a href="https://saiful.web.id/wp-content/uploads/2021/05/SARJANA_IPS_EVITA_MARTHA_DEWI_18016662_KTI.pdf">https://saiful.web.id/wp-content/uploads/2021/05/SARJANA_IPS_EVITA_MARTHA_DEWI_18016662_KTI.pdf</a>				
8	Dinda Amelia, Putri Amalia Saqina Nasution, Sella Permana Putri, Tony Junior Barus,Fitri Hayati (Amelia et al., 2025)	Analisis Keberhasilan Program Lembaga Keuangan Mikro dalam Mendukung UMKMdi Medan	Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif.	LKM berperan penting dalam mengatasi keterbatasan modal dan mendorong produktivitas UMKM. Untuk mengatasi hambatan seperti risiko kredit dan regulasi kompleks, diperlukan kolaborasi dengan lembaga keuangan formal serta penyederhanaan kebijakan guna memperkuat peran LKM sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.
Link akses : <a href="https://teewanjournal.com/index.php/peng/article/view/1335">https://teewanjournal.com/index.php/peng/article/view/1335</a>				

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana tercantum pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa *microfinance* memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan, peningkatan literasi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Namun, masing-masing penelitian menyoroti dimensi dan pendekatan yang berbeda dalam memaknai kontribusi tersebut.

Penelitian oleh Kurniawan dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)* memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas internal lembaga melalui digitalisasi dan penguatan literasi keuangan syariah. Pendekatan ini menjawab tantangan efisiensi dan transparansi dalam operasional mikrofinance modern. Penelitian Wahab dan Mahdiya (2021) juga menegaskan bahwa *Islamic microfinance* berperan besar dalam pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek *financial inclusion* dan *poverty alleviation*, meskipun masih terkendala keterbatasan modal dan infrastruktur digital.

Sementara itu, Valdiansyah dan Widiyati (2020) memfokuskan pada konsep *sustainable finance*, dengan menekankan perlunya perubahan paradigma pelaku UMKM dari orientasi keuntungan jangka pendek menjadi orientasi keberlanjutan ekonomi dan sosial jangka panjang. Hal ini relevan dengan upaya mendorong UMKM agar lebih berkontribusi terhadap SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) dan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*).

Penelitian oleh Baramurti dan Sandy (2020) menyoroti pentingnya inovasi model pembiayaan berkelanjutan dalam *Islamic microfinance*, yang tidak hanya memperkuat daya saing UMKM tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan Trimulato, Syamsu, dan Octaviany (2020)

yang menegaskan bahwa pembiayaan produktif UMKM oleh bank syariah terbukti meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian Pembudi Nugroho et al. (2022) menambahkan dimensi baru dengan mengaitkan *trust* dan *perceived risk* terhadap inklusi asuransi UMKM dalam pencapaian SDGs. Penelitian ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program inklusi finansial. Sementara Evita Martha Dewi (2021) menawarkan perspektif integratif melalui model *InBank* yang menghubungkan bank umum, LKM, dan fintech untuk memperluas jangkauan pembiayaan mikro secara efisien.

Penelitian terakhir oleh Dinda Amelia et al. (2023) yang dilakukan di Medan menunjukkan bahwa LKM berperan penting dalam mendukung UMKM lokal, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh hambatan struktural seperti regulasi yang kompleks, risiko kredit, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Studi tersebut menegaskan perlunya sinergi antara LKM dan lembaga keuangan formal agar tujuan pembangunan ekonomi daerah dapat tercapai secara optimal.

Dari seluruh temuan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa mikrofinance terbukti memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tiga hal utama: 1. kemampuan lembaga untuk berinovasi melalui digitalisasi dan kemitraan lintas sektor, 2. kapasitas literasi keuangan penerima manfaat, dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem keuangan mikro.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan jika lembaga benar-benar berfungsi sebagai sektor strategis dan bukan sekadar intervensi sementara, maka diperlukan pendekatan berbasis sistem keberlanjutan daerah. Pertama, dari aspek kelembagaan. Lembaga mikrofinance di Binjai perlu memperkuat kapasitas manajerial dan tata kelola keuangannya. Banyak koperasi dan LKM di daerah ini masih menghadapi kendala transparansi dan efisiensi operasional. Pemerintah Kota Binjai dapat berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan melalui kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong inovasi kelembagaan.

Selanjutnya Orientasi ekonomi yang produktif juga harus membantu keberlanjutan mikrofinance Binjai. Banyak program pembiayaan mikro lokal mengabaikan pendampingan pasca-pinjaman ketika dana disalurkan. Akibatnya, beberapa pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam mengelola modal dan mengembangkan bisnis mereka secara konsisten. Hal ini sesuai dengan penelitian Andri Soemitra, Dkk (2022) hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro bukan hanya memberikan modal pembiayaan modal usaha kepada anggotanya. Peningkatan integritas perlu menjadi perhatian. Bahwa Lembaga Keuangan Mikro juga harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas nasabah melalui pendidikan dan pendampingan rutin (Soemitra et al., 2022).

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu dan konteks empiris Kota Binjai, dapat disimpulkan bahwa kontribusi microfinance terhadap pencapaian SDGs sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem lembaga, tingkat literasi keuangan penerima manfaat, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi LKM di Kota Binjai masih menghadapi tantangan struktural seperti kapasitas kelembagaan yang belum optimal, keterbatasan digitalisasi, dan minimnya sinergi lintas lembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawan & Rahman (2024) yang menekankan bahwa efektivitas LKM hanya dapat tercapai apabila lembaga tersebut memperkuat kapasitas internal dan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya. Artinya, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa penguatan tata kelola LKM merupakan prasyarat penting bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang berkualitas (Kurniawan & Rahman, 2024).

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperkuat konsensus bahwa *microfinance* memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan UMKM dan pencapaian SDGs. Namun, penelitian juga menekankan bahwa konteks daerah sangat memengaruhi seberapa efektif kontribusi tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak melihat daerah dengan sistem keuangan mikro yang lebih maju, seperti Yogyakarta, Jawa Barat, atau Jawa Tengah. Sebaliknya, penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana *microfinance* berfungsi di daerah yang kurang maju dari sisi kelembagaan. Penelitian ini tidak hanya membenarkan hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga mengisi celah penelitian tentang bagaimana meningkatkan regulasi lokal dan edukasi berkelanjutan sebagai bagian dari pendekatan untuk membangun sistem *microfinance* yang stabil dan berkelanjutan di Kota Binjai.

#### 4. Kesimpulan

Mikrofinance dan sektor UMKM di Kota Binjai sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Microfinance tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong ekonomi melalui peningkatan pengetahuan keuangan, pendampingan usaha, dan inklusi keuangan yang lebih merata. Namun, kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan kemampuan LKM untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan digital dan kebutuhan UMKM lokal sangat memengaruhi kualitas kontribusi tersebut. Studi menunjukkan bahwa peran LKM dalam mendorong UMKM di Kota Binjai sudah terlihat, tetapi masih belum optimal karena masih ada beberapa hambatan, seperti transformasi digital yang lemah, pendampingan pasca-pinjaman yang kurang, dan keterbatasan koordinasi antar lembaga. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya digitalisasi, pembangunan kepercayaan, serta inovasi model pembiayaan berkelanjutan dalam meningkatkan kontribusi microfinance terhadap SDGs.

Namun demikian, untuk menjadikan microfinance sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan, ekosistem LKM harus diperkuat. Ini akan mencakup meningkatkan kapasitas manajemen, meningkatkan transparansi kelembagaan, mengembangkan inovasi digital, dan mendukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih adaptif. Agar UMKM dapat bertahan dan berkembang, program pendampingan dan literasi keuangan harus menjadi bagian penting dari setiap operasi pembiayaan. Penelitian ini menemukan bahwa microfinance memiliki potensi besar untuk mempercepat pencapaian SDGs di tingkat daerah. Namun, ini hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan LKM, pemerintah daerah, UMKM, dan lembaga keuangan lainnya bekerja sama untuk membangun sistem keuangan mikro yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

#### Referensi

1. Amelia, D., Amalia, P., Nasution, S., Putri, S. P., Junior, T., & Hayati, F. (2025). *Analisis Keberhasilan Program Lembaga Keuangan Mikro dalam Mendukung UMKM di Medan*. 2(1), 2643–2649.
2. Banerjee, B. (2017). Sustainable Development Goals. *DK Taneja's Health Policies and Programmes in India*, 10(April), 28–28. [https://doi.org/10.5005/jp/books/13071\\_5](https://doi.org/10.5005/jp/books/13071_5)
3. DANG, T. T., & VU, H. Q. (2020). Fintech in Microfinance: a new direction for Microfinance institutions in Vietnam. *Journal of Business Economics and Environmental Studies*, 10(3), 13–22. <https://doi.org/10.13106/jbees.2020.vol10.no3.13>
4. Findawati, Y., & Astutik, I. R. I. (2016). Aplikasi Web Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Menggunakan Metode Fuzzy-Ahp, Wpm Dan Balanced Scorecard. *Jurnal Sistem Informasi*, 12(1), 30. <https://doi.org/10.21609/jsi.v12i1.466>
5. gita somantri. (2018). *INBANK: STRATEGI INTEGRASI LEMBAGA KEUANGAN UNTUK PENYALURAN KREDIT MIKRO DI INDONESIA*.
6. Jee Sinha, K., Sinha, S., & Sinha, B. J. (2024). Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs): The Significant Role and Challenges in Indonesia's Economy. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(3), 0–10. [www.ijfmr.com](http://www.ijfmr.com)
7. Kurniawan, A., & Rahman, A. (2024). Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pencapaian SDGs : Studi Kasus BMT IMADA Kuningan. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(2), 164–180.
8. Kusjuniati, K. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi COVID 19 di Indonesia. *Widya Balina*, 5(2), 137–147. <https://doi.org/10.53958/wb.v5i2.58>
9. Letras, S. R. De. (2005). *Author ( s ) : Massimo Cacciari*. 45(1), 13–22.
10. Masanyiwa, Z. S., Chusi, T. N., & Haji, A. U. (2022). Determinants for Sustainability of Microfinance Institutions in North "A" District in Zanzibar. *Open Journal of Business and Management*, 10(04), 1583–1600. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2022.104083>
11. Montgomery, H., & Weiss, J. (2011). Can commercially-oriented microfinance help meet the millennium development goals? Evidence from Pakistan. *World Development*, 39(1), 87–109. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.09.001>
12. Mulyati, E., & Harieti, N. (2018). Model of business activities of microfinance institutions in Indonesiafile:///C:/Users/Fajar Surya/Downloads/Documents/ANALISIS MODEL BISNIS PADA KNM FISH FARM DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS BMC.pdf. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1), 326–341.
13. Nainggolan, F. A., & Budiman, M. A. (2024). Analisis Potensi dan Resiko Bonus Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. In *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia* (Vol. 6, Issue 2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPEI>
14. Niaz, M. U. (2022). Socio-Economic development and sustainable development goals: a roadmap from vulnerability to sustainability through financial inclusion. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 35(1), 3243–3275. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1989319>
15. Nugraha, F. A., Ahmatang, A., Ali, H., Lukiyanto, K., & Tawil, M. R. (2025). Influence Of External and Internal Factors On The Performance Of MSMEs In Indonesia. *Maneggio*, 2(1), 237–245. <https://doi.org/10.62872/5wtkae52>
16. Nugroho, P., Pratama, S., Ahmad, F., Nugroho, N. Y., Administrasi, F. I., Insurance, A. G., Arthagraha, G. A., Brawijaya, U., Veteran, J., Lowokwaru, K., Malang, K., & Timur, J. (2025). PERAN KEPERCAYAAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP INKLUSI ASURANSI UMKM DALAM PENCAPAIAN SDGs 2030 DI INDONESIA. *Premium Insurance Business Journal*, 12(2), 19–30.
17. Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Pembiayaan Mikro 2022. *Otorisasi Jasa Keuangan*, 1–69.
18. Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. *The Lancet*, 379(9832), 2206–2211. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0)
19. Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2022). Collateral imposition and financial inclusion: a case study among Islamic banks and MSMEs in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 42–63. <https://doi.org/10.1108/ies-04-2022-0023>
20. Sandy, N. B. E. E. S. (2022). Peran Islamic Microfinance dalam Menciptakan Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM di Indonesia. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(2), 79–86. <http://jurnal.unmuhibmember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/8809>
21. Sefti Arif Lubis Paidi Hidayat, M. (2020). Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 16–28.
22. Soemitra, A., Kusmilawaty, & Rahma, T. I. F. (2022). The Role of Micro Waqf Bank in Women's Micro-Business Empowerment

- through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia. *Economies*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/economics10070157>
- 23. Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). the Urgence Regulation of Business Activities on Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207–221. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.014021>
  - 24. Tim Peneliti. (2022). Ekosistem Lembaga Pembiayaan Mikro. *Laporan Penelitian Kerjasama Penelitian*, 1–89.
  - 25. Tremblay, J., Regnerus, M. D., Educação, S. D. A. S. N. D. E., Júnior, F. T., Sanfelice, J. L., Tavares Júnior, F., Dourado, L. F., Brito, M. M. A. de, Maiti, Bidinger, Sposito, M. P., Dubet, F. F., Ribeiro, C. A. C., Silva, N. do V., Barbosa, M. L. de O., Cunha, N. M., Dayrell, J., Rogošić, S., Baranović, B., ... Alves, S. (2016). The Impact Of Microfinance Institution on Economic Growth: A Literature Study in Indonesia. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699. [http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao\\_PereiraAS\\_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs\\_00\\_1/rbcs11\\_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td\\_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/](http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_1/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/)
  - 26. Valdiansyah, R. H., & Widiyati, D. (2024). Peranan Sustainable Finance Pada Industri UMKM Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 47–55. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.713>
  - 27. Wahab, A., & Mahdiya, I. (2025). *Peran Keuangan Mikro Islam dalam Mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia*.
  - 28. Wilson, T. A. (2012). Supporting social enterprises to support vulnerable consumers: The example of community development finance institutions and financial exclusion. *Journal of Consumer Policy*, 35(2), 197–213. <https://doi.org/10.1007/s10603-011-9182-5>